

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Coret Dana Hibah Pensiun Rp 3 Miliar

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta mencoret program maupun kegiatan yang tidak berguna dalam RAPBD 2018. Anggaran tersebut kemudian dialihkan ke kegiatan lain yang lebih bermanfaat.

Kegiatan yang dicoret yakni dana hibah untuk pensiunan PNS sebesar Rp3 miliar, DPD RI Rp1,5 miliar, dan penataan kolam air mancur di DPRD DKI Rp620 juta (*selengkapnya lihat infografis*).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyebutkan, dalam pembahasan RAPBD di Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Banggar banyak menemukan kegiatan yang muncul, tetapi tidak jelas manfaatnya. Saat ditanyakan pada pengusul kegiatan, tidak ada satu pun jawaban yang memuaskan.

Misalnya untuk dana hibah Laskar Merah Putih (LMP), DPD, dan sebagainya. Menurut dia, kalau LMP dapat maka organisasi kemasyarakatan (ormas) lainnya seperti Pemuda Pancasila (PP) dan Pemuda Panca Marga (PPM) semestinya juga dapat. Begitu juga dengan DPD.

"Banyak yang dicoret dan dikurangi. Hampir setiap pembahasan selalu begini. Eksekutif tidak cermat mengusulkan kegiatan karena enggak bisa mempertanggungjawabkan," ujar Bestari di DPRD DKI Jakarta kemarin.

Meski mengalami pencoretan dan pengurangan kegiatan, total RAPBD DKI 2018 sebesar Rp77,1 triliun tidak mengalami pengurangan. Justru total anggaran naik Rp6 miliar yang berasal dari dividen sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD).

Anggaran yang dicoret dan dikurangi tersebut dialokasikan ke kegiatan lain yang dinilai lebih bermanfaat. Sayangnya, dia tidak mengetahui kegiatan apa yang mengalami penambahan. "Kegiatan belanja langsung yang bermanfaat bagi warga pastinya penebalan anggaran itu," katanya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mencurigai adanya dana siluman yang dimasukkan ke RAPBD. "Jangan membuat kita dipandang negatif oleh masyarakat. Itu uang rakyat loh," ucapnya.

Politikus PDIP itu menilai terjadi rangkap anggaran pada masa pensiun PNS DKI. "Coba lihat dana hibah poin 86 untuk Paguyuban Werdatama Jaya Rp2,1 miliar dan poin 99 dana hibah untuk Yayasan Pensiunan Pemprov DKI Jakarta Rp739 juta. Saya lihat itu coret saja salah satu lumayan totalnya Rp3 miliar," ujar Prasetyo.

Akhirnya dia menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefulah untuk mencoret anggaran tersebut. Dia tak ingin penerima dana hibah diberikan kepada yang tak semestinya menerima.

Sejurus kemudian, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika merasa ada kejanggalan dalam pemberian anggaran untuk Paguyuban Werdatama Jaya. "Dana hibah itu sudah dua tahun berturut-turut kami berikan kepada kedua yayasan. Paguyuban Werdatama

Jaya adalah perkumpulan mantan pejabat yang menerima dana pensiun. Kami berikan sebagai tunjangan hari tua," kata Agus.

Menanggapi itu, Saefulah yang juga ketua TAPD DKI langsung bergegas menghapus dana hibah tersebut. "Jadi sudah dua tahun kan, dihapus saja, langsung kita selesaikan di sini," tandasnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, RAPBD DKI 2018 sudah seimbang. Dari awalnya Rp77,110 triliun setelah pembahasan bersama antara Banggar dan TAPD menjadi Rp77,117 triliun termasuk program *multiyears*. "Paripurna Insya Allah Kamis (30/11)," ucapnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjelaskan, penambahan RAPBD disebabkan pendapatan dan pembiayaan naik, namun dia tidak merinci kenaikan

tersebut lantaran akan diinput terlebih dahulu oleh TAPD.

Terpenting APBD DKI 2018 untuk rakyat yang selama ini belum tersentuh pembangunan. "Anggaran ini berpihak kepada warga, khususnya warga yang ada di strata warga kurang mampu," ujarnya.

Menurut dia, anggaran yang dicoret dan dipangkas tentunya anggaran yang dirasakan kurang bermanfaat seperti kolam ikan yang dicoret atas inisiatif Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Namun, anggaran yang dianggap besar manfaatnya dan paling besar anggarannya yakni pendidikan, kedua kesehatan, ketiga adalah pembangunan fasilitas untuk menanggulangi kemungkinan-kemungkinan seperti ancaman banjir dan membangun infrastruktur untuk mengurangi kemacetan. "Itu yang paling besar dan menurut saya itu *non-negotiable* untuk rakyat," kata Sandi.

Dia mengajak warga untuk mengawasi realisasi anggaran. Jangan sampai setelah pembahasan ini tidak ada yang mengawasi. Dia optimistis pengawasan lebih banyak karena kegiatan yang diambil berbasis gerakan masyarakat.

"Saya pengalamanlah kalau lagi membangun usahakan bagaimana biaya ditekan serendah mungkin penghasilan ditingkatkan setinggi mungkin dan ini semuanya untuk masyarakat khususnya kelas menengah kebawah," ungkapnya.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Coret Dana Hibah Pensiun Rp 3 Miliar

Sementara itu, pemerhati transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwilaksana menuturkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno dalam dua hingga tiga tahun pertama harus fokus memperbaiki kualitas infrastruktur transportasi publik dan membatasi kendaraan pribadi. Dengan demikian, kemacetan di Jakarta akan berkurang.

Dalam Pola Transportasi Makro (PTM) ada tiga tahapan yaitu perbaikan dan penambahan moda transportasi, penambahan infrastruktur, serta pembatasan kendaraan. Saat ini penambahan moda transportasi berbasis rel baik *mass rapid transit* (MRT) atau *light rail transit* (LRT) tengah dilakukan termasuk perbaikan *bus rapid transit* (BRT).

Anies-Sandi harus fokus mengimplementasikan secara terpadu pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi berikut pemberlakuan *electronic road pricing* (ERP) sekaligus membatasi sepeda motor di jalur tertentu serta fasilitas pendukung lain seperti trotoar, jembatan penyeberangan orang (JPO), dan *zebra cross*.

● bima setiyadi

ANGGARAN PRIORITAS

RAPBD DKI Jakarta 2018 memfokuskan program ataupun kegiatan prioritas seperti penanganan banjir, kemacetan, pendidikan, dan kesehatan.

APBD 2017.

Rp70,1 triliun

RAPBD DKI 2018.

Rp77,1 triliun

► Belanja Daerah: Rp71,16 triliun

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp30,65 triliun

meliputi Belanja Pegawai Rp20,12 triliun, Belanja Bunga Rp50,52 miliar, Belanja Subsidi Rp4,21 triliun, Belanja Hibah Rp1,75 triliun, Belanja Bantuan Sosial Rp4,07 triliun, Belanja Bantuan Keuangan Rp271,78 miliar, dan Belanja Tidak Terduga Rp153,02 miliar

Belanja Langsung sebesar Rp40,51 triliun



ANGGARAN DIPANGKAS

- Penataan kolam air mancur di DPRD DKI sebesar Rp620 juta
- Kunjungan kerja komisi-komisi DPRD dari Rp107 miliar menjadi Rp64 miliar
- DPD RI Rp1,5 miliar
- Hibah dana pensiun Rp3 miliar
- Laskar Merah Putih Rp500 juta menjadi Rp100 juta

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



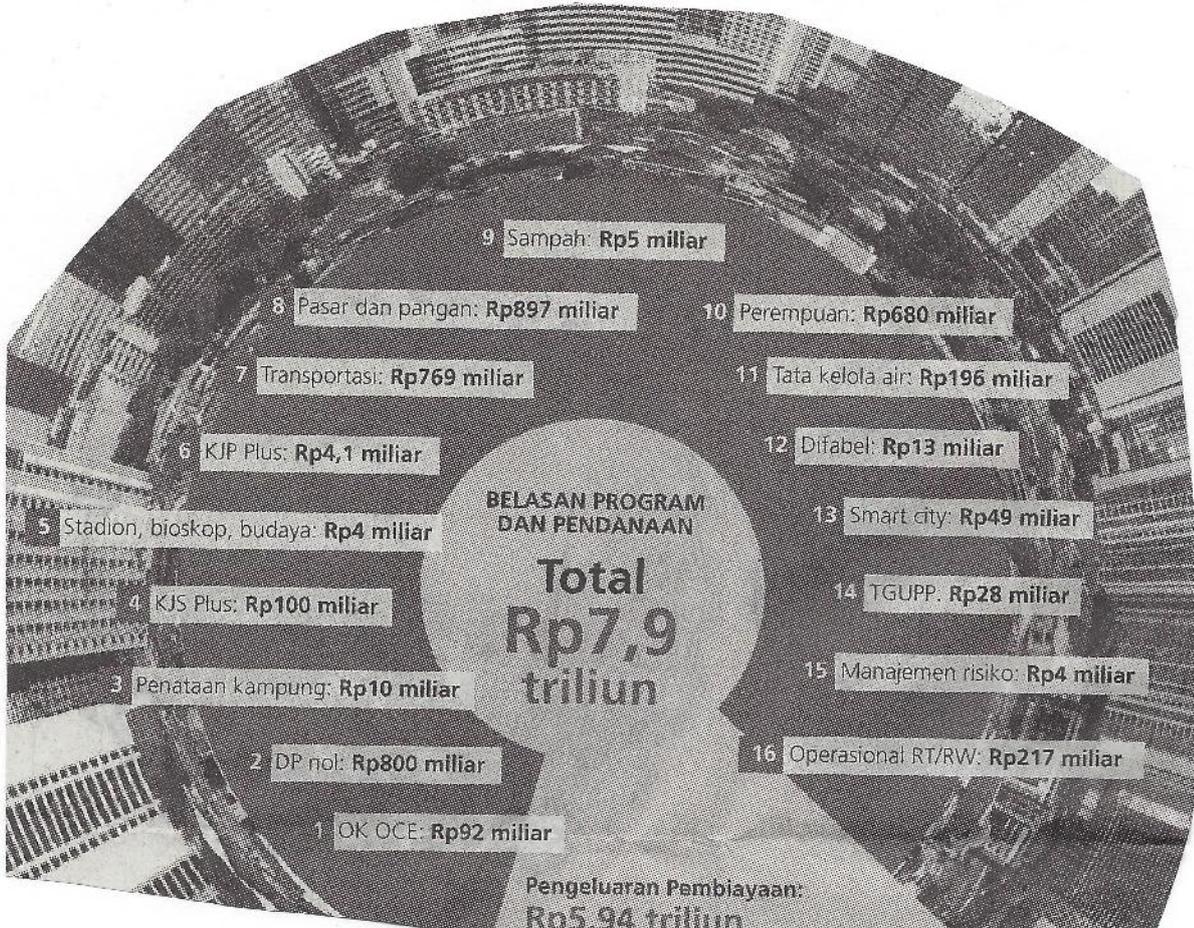
SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Coret Dana Hibah Pensiun Rp 3 Miliar



Pengeluaran Pembiayaan: Rp5,94 triliun

- Penyediaan transportasi massal dalam rangka penanggulangan kemacetan
- Penugasan beberapa proyek infrastruktur, khususnya sarana dan prasarana Asian Games 2018
- Pembayaran utang pokok

JANJI KERJA ANIES-SANDI

- Membuka lapangan kerja dan kewirausahaan baru melalui program OK OCE
- Meningkatkan akses pendidikan melalui pelayanan KJP Plus
- Meningkatkan derajat kesehatan melalui pemenuhan universal coverage
- Melaksanakan penataan kawasan secara terpadu
- Menyediakan hunian layak dan terjangkau melalui program DP Nol Rupiah
- Menyediakan layanan transportasi terpadu melalui program Ok Otrip
- Pemulihan perempuan dan perlindungan anak
- Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, modern, dan melayani

KORAN SINDO WIRI CAHYONO